THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INITIATIVE!

Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia

Putu Rusta Adijaya
Peneliti Bidang Ekonomi
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Adanya indeks-indeks kebebasan ekonomi, seperti indeks *Economic Freedom of the World* (EFW) oleh Gwartney, Lawson, dan Murphy (2024) maupun *Index of Economic Freedom* (IEF) oleh Kim dan Roberts (2024), mampu mengakomodir analisis kuantitatif. Indeks kebebasan ekonomi tersebut dapat digunakan untuk mewujudkan bukti empiris dan sistematis yang kuat mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebebasan ekonomi (Berggren, 2024).

- **Kedua indeks tersebut sudah banyak digunakan untuk melihat pengaruh kebebasan ekonomi, seperti pengaruhnya bagi lingkungan.**
  - Indeks EFW => Carlsson dan Lundström (2001) yang menemukan bahwa dampak langsung dari seluruh variabel kebebasan ekonomi yang diteliti (*size of government, structure and use of markets, price stability and legal security, freedom of exchange in capital markets*) sebagian besar bertanda negatif terhadap emisi karbon dioksida (CO2) di negara pendapatan rendah, tetapi meningkatkan emisi di negara berpendapatan tinggi. Mereka juga menemukan bahwa komponen kebebasan ekonomi EFW yang memiliki pengaruh marjinal negatif terhadap emisi CO2 di negara berpendapatan tinggi adalah ukuran pemerintahan.
  - IEF => Mahmood, Shahab, dan Shahbaz (2021) yang menemukan bahwa kebebasan ekonomi memberikan dampak dalam jangka panjang terhadap penurunan emisi CO2 di negara Asia-Pasifik, karena agen ekonomi mampu membuat keputusannya sendiri yang mengarah pada keberlanjutan, seperti bertindak sebagai kurator sumber daya dan memperlancar kemajuan dalam efisiensi sumber daya.

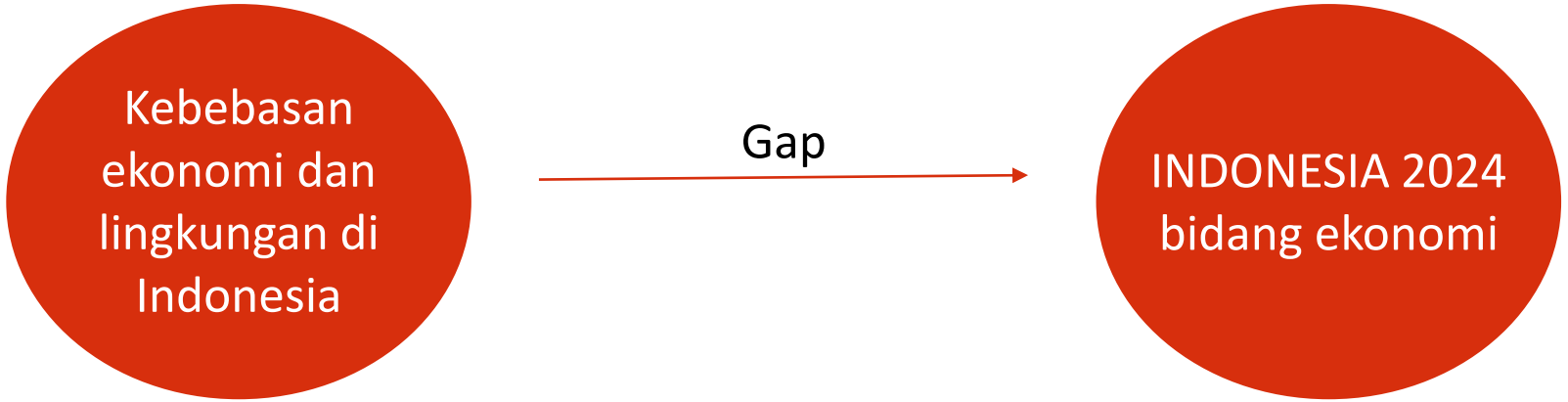
Sejauh pengetahuan dan pencarian penulis, hampir belum ada penelitian terkait analisis *time series* pengaruh kebebasan ekonomi bagi lingkungan dengan Indonesia sebagai fokusnya.

- Beberapa penelitian yang membahas pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan lebih banyak menggunakan panel data. Misalnya, Setyadharma et al. (2021) menggunakan data panel untuk menguji pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan di tujuh negara The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Penelitian yang menggunakan *time series* terkait kebebasan ekonomi dan lingkungan untuk negara ASEAN adalah Sukmaningrum (2022).
  - Kajian INDONESIA 2024 ini mencoba untuk memperkaya literatur kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia.

Pentingnya mengkaji pengaruh tersebut dilandasi oleh dua hal:

- kebebasan ekonomi membuka kesempatan bagi individu untuk berinovasi dan beraktivitas ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan, dan
- lingkungan adalah salah satu unsur penting yang difokuskan dalam Asta Cita dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Prabowo).

Adapun dua hal yang dibahas dalam laporan ini adalah (1) kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode 2019-2024 dan komparasi kebebasan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara anggota ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta (2) melihat secara empiris apakah ada tidaknya hubungan antara kebebasan ekonomi dan lingkungan di Indonesia.



1. Bagaimana kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024) dan bagaimana komparasi kebebasan ekonomi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam)?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kebebasan ekonomi dan kondisi lingkungan di Indonesia? Jika berpengaruh signifikan, bagaimana pengaruhnya? Jika tidak berpengaruh signifikan, apa kemungkinan penyebabnya?
3. Apa saja rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong kebebasan ekonomi dan keberlanjutan di Indonesia?

Walaupun secara umum definisi kebebasan ekonomi dalam EFW dan IEF terlihat sama, yaitu berkaitan dengan kebebasan individu untuk beraktivitas ekonomi berdasarkan kebutuhan dan keinginannya, jumlah komponen dan subkomponen yang digunakan dalam perhitungan indeks terlihat cukup berbeda.

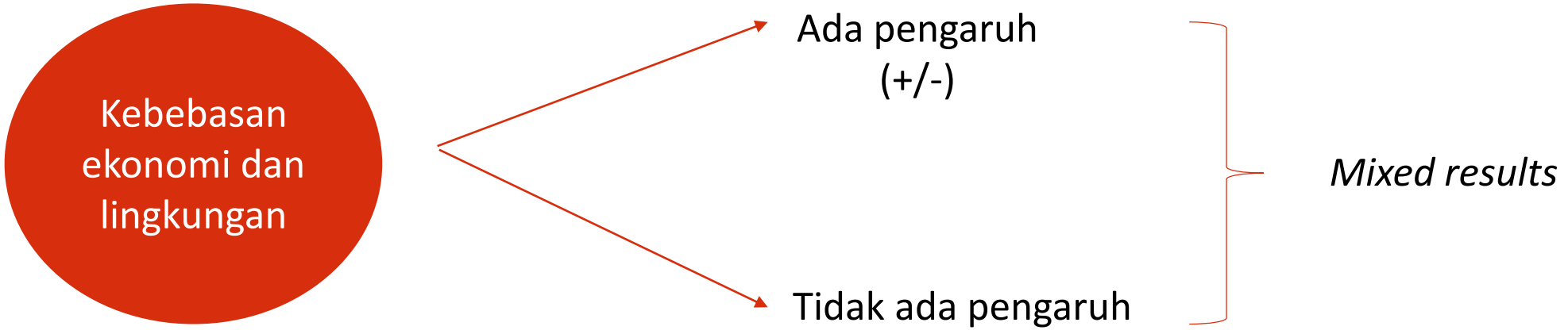
- EFW mengukur lima area utama, yaitu (1) ukuran pemerintahan (*the size of government*), (2) sistem hukum dan hak milik (*legal system and property rights*), (3) uang yang sehat (*sound money*), (4) kebebasan untuk berdagang internasional (*freedom to trade internationally*), serta (5) regulasi (*regulation*), dengan skala dari 0 sampai 10.

- **IEF mengukur 12 komponen yang dibagi ke dalam empat aspek utama, yaitu (1) supremasi hukum (*rule of law*), (2) ukuran pemerintah (*government size*), (3) efisiensi regulasi (*regulatory efficiency*), dan (4) keterbukaan pasar (*market openness*),** di mana IEF berskala dari 0 hingga 100.
  - Supremasi hukum: sub-komponen hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah,
  - Ukuran pemerintah: sub-komponen beban pajak, belanja pemerintah, dan kesehatan fiskal,
  - Efisiensi regulasi: sub-komponen kebebasan berbisnis, kebebasan tenaga kerja, dan kebebasan moneter,
  - Keterbukaan pasar: sub-komponen kebebasan berdagang, kebebasan investasi, dan kebebasan finansial.

Hingga saat ini, belum ada konsensus universal terkait dengan pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan.

- Rapsikevicius et al. (2021) menyimpulkan bahwa kebebasan ekonomi yang lebih tinggi di 23 negara yang dianalisis trennya menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih tinggi.
  - Namun, Rapsikevicius et al. (2021) juga menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kebebasan ekonomi dengan kinerja lingkungan berdasarkan analisis tren dan mereka juga menemukan hasil yang beragam setelah mengelompokkan negara tersebut.
- Sun, Zhang, dan Xu (2017) yang mengkaji Tiongkok menggunakan data time series periode 1980-2012 dengan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) menemukan bahwa kebebasan ekonomi yang menggunakan data EFW tidak berpengaruh signifikan terhadap emisi CO2 dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menunjukkan bahwa variabel kebebasan ekonomi mungkin tidak terlalu berkaitan dengan emisi di Tiongkok.
- Chen (2022) yang meneliti negara Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) pada periode 1990-2018 dengan ARDL. Dengan kebebasan ekonomi yang diproksi oleh ukuran pemerintahan, menemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, ukuran pemerintahan berdampak positif signifikan (meningkatkan) emisi CO2 di Brazil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun, negatif signifikan (menurunkan) emisi CO2 di Rusia.

- Majeed et al. (2021) yang meneliti Pakistan dengan menggunakan metode ARDL dan *Nonlinear Autoregressive Distributed Lag* (NARDL) pada periode 1990-2019:
  - Hasil linear ARDL menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dan variabel lainnya tidak menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan polusi. Namun, kebebasan ekonomi secara signifikan mengurangi polusi dalam jangka panjang.
  - Hasil NARDL untuk model polusi menunjukkan bahwa sebagian perubahan positif dalam kebebasan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap emisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



1. Bagaimana kondisi lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024) dan bagaimana komparasi kebebasan ekonomi antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam)?

- Deskriptif kualitatif
  - Guna memahami lanskap kebebasan ekonomi di Indonesia selama periode 2019-2024, laporan Index of Economic Freedom (IEF) oleh Kim dan Roberts (2024) akan digunakan.

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kebebasan ekonomi dan kondisi lingkungan di Indonesia? Jika berpengaruh signifikan, bagaimana pengaruhnya? Jika tidak berpengaruh signifikan, apa kemungkinan penyebabnya?

- Mengmulasi Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dalam Murjani (2019). ARDL adalah model yang diformulasikan oleh Pesaran, Shin, Smith (PSS) (2001). Panjang data yang digunakan adalah dari tahun 1995-2024. Spesifikasi model untuk menjawab pertanyaan kedua dapat diformulasikan dalam fungsi sebagai berikut:

$$EcoFP = f(GDPcap, EnConscap, LCSE, GI) \qquad (1)$$

  - EcoFP: *ecological footprint* oleh Global Footprint Network dalam unit *global hectares*,
  - GDPcap: Produk Domestik Bruto (PDB) konstan US$ 2015 dari Bank Dunia,
  - EnConscap: konsumsi energi primer per kapita dalam unit KwH per orang dari OurWorldinData,
  - LCSE: *low carbon energy from renewable source* dalam unit % *equivalent primary energy* yang datanya diambil dari OurWorldinData,
  - GI: indeks integritas pemerintah (*government integrity*) dari Index of Economic Freedom (IEF) dengan indeks 0-100 oleh Kim dan Roberts (2024).

Kim dan Roberts (2024) mengatakan bahwa sub-komponen *government integrity* menjelaskan bahaya korupsi, praktik-praktik seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, kronisme, patronase, penggelapan bagi kebebasan ekonomi individu, di mana kurangnya integritas pemerintah yang diakibatkan oleh praktik-praktik tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat dan vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya kegiatan ekonomi.

- Indeks integritas pemerintah dimasukkan sebagai salah satu dari variabel bebas mengingat salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo dalam Asta Cita adalah pemberantasan korupsi.

$$\Delta LogEcoFP_t = \alpha_0 + \beta_1 LogEcoFP_{t-1} + \beta_2 LogGDPcap_{t-1} + \beta_3 LogEnConscap_{t-1} + \beta_4 LCSE_{t-1} + \beta_5 LogGI_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_{1i} \Delta LogEcoFP_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \delta_{2i} \Delta LogGDPcap_{t-j} + \sum_{k=0}^{q} \delta_{3i} \Delta LogEnConscap_{t-k} + \sum_{l=0}^{q} \delta_{4i} \Delta LCSE_{t-l} + \sum_{m=0}^{q} \delta_{5i} \Delta LogGI_{t-m} + \varepsilon_t \quad (2)$$

di mana Log adalah logaritma natural, α_0 adalah konstan, $\beta_1 - \beta_4$ adalah koefisien jangka panjang. *Bounds Test* oleh Pesaran *et al.* (2001) digunakan untuk melihat apakah ada kointegrasi jangka panjang.

- Terdapat dua himpunan *critical values*: I(0) dan I(1).
  - Jika F-statistik yang dihitung melebihi batas atas (I(1)) dari *critical* v*alue*, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada hubungan jangka panjang akan ditolak.
  - Jika F-statistik yang dihitung berada di bawah batas bawah (I(0)) dari *critical* v*alue*, maka hipotesis nol (H_0) akan tidak ditolak.
  - Namun, jika statistik F yang dihitung berada di antara *critical* v*alue* batas bawah dan batas atas, maka tidak ada kesimpulan (Sugiawan & Managi, 2016).

Jika terdapat kointegrasi dalam jangka panjang, langkah selanjutnya adalah memperkirakan persamaan jangka panjang:

$$LogEcoFP_t = \alpha + \gamma_1 LogGDPcap_t + \gamma_2 LogEnConscap_t + \gamma_2 LCSE_t + \gamma_3 LogGI_t + \mu_t \qquad (3)$$

Dan langkah selanjutnya adalah mengestimasi model jangka pendek dengan *Error Correction Model* (ECM) yang dinyatakan sebagai berikut:

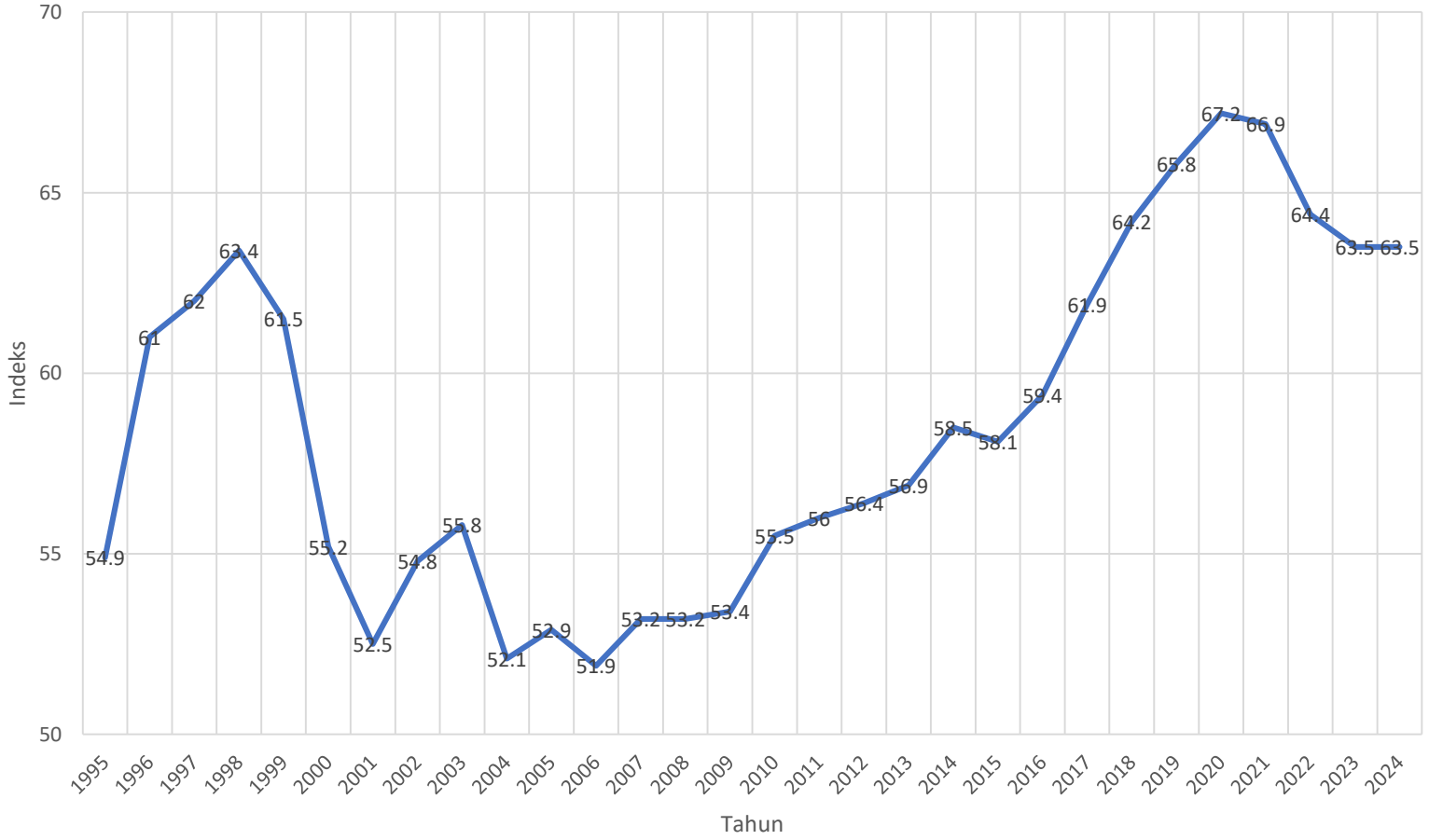
$$\Delta LogEcoFP_t$$

$$= \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \delta_{1i} \Delta LogEcoFP_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_{1i} \Delta LogGDPcap_{t-j} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_{2i} \Delta LogEnConscap_{t-j} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_{3i} \Delta LCSE_{t-j} + \sum_{j=0}^{q} \varphi_{4i} \Delta LogGI_{t-j} + \tau ECT_{t-1} + \varepsilon_t \qquad (4)$$

yang mana δ dan φ adalah koefisien jangka pendek dan τ adalah *speed of adjusment*.

Kondisi Lanskap Kebebasan Ekonomi di Indonesia Selama Periode 2019-2014 dan Perbandingannya dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam

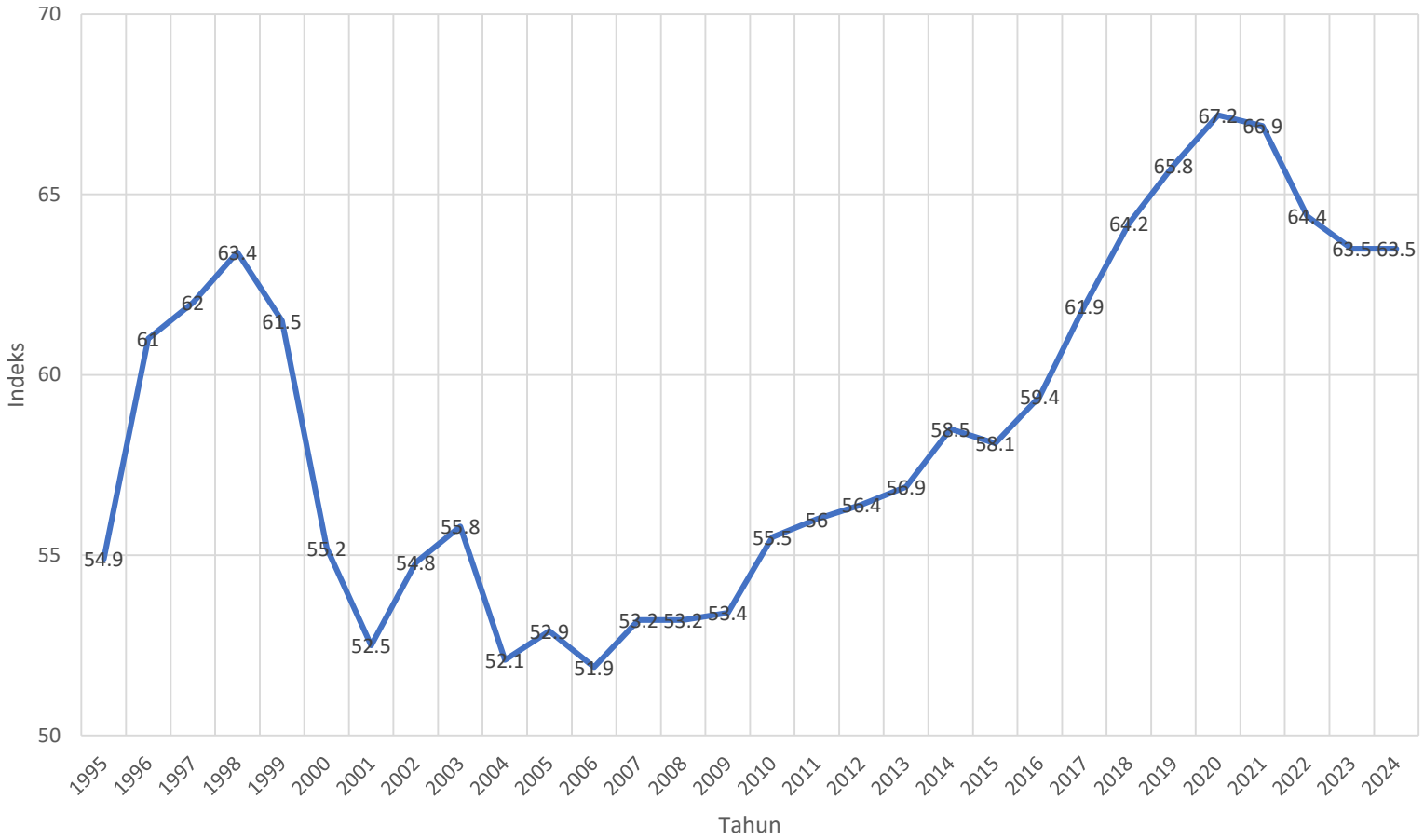
Grafik 1. *Index of Economic Freedom* Indonesia Periode 1995-2024



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2024). Diolah penulis.

- Indeks kebebasan ekonomi di Indonesia cukup fluktuatif.
  - tren kenaikan tajam sejak tahun 2015 atau satu tahun setelah pemerintahan Presiden Jokowi.
- Nilai indeks kebebasan ekonomi di Indonesia bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 67,2.
- Namun, indeks kebebasan ekonomi terlihat menurun sejak tahun 2020.

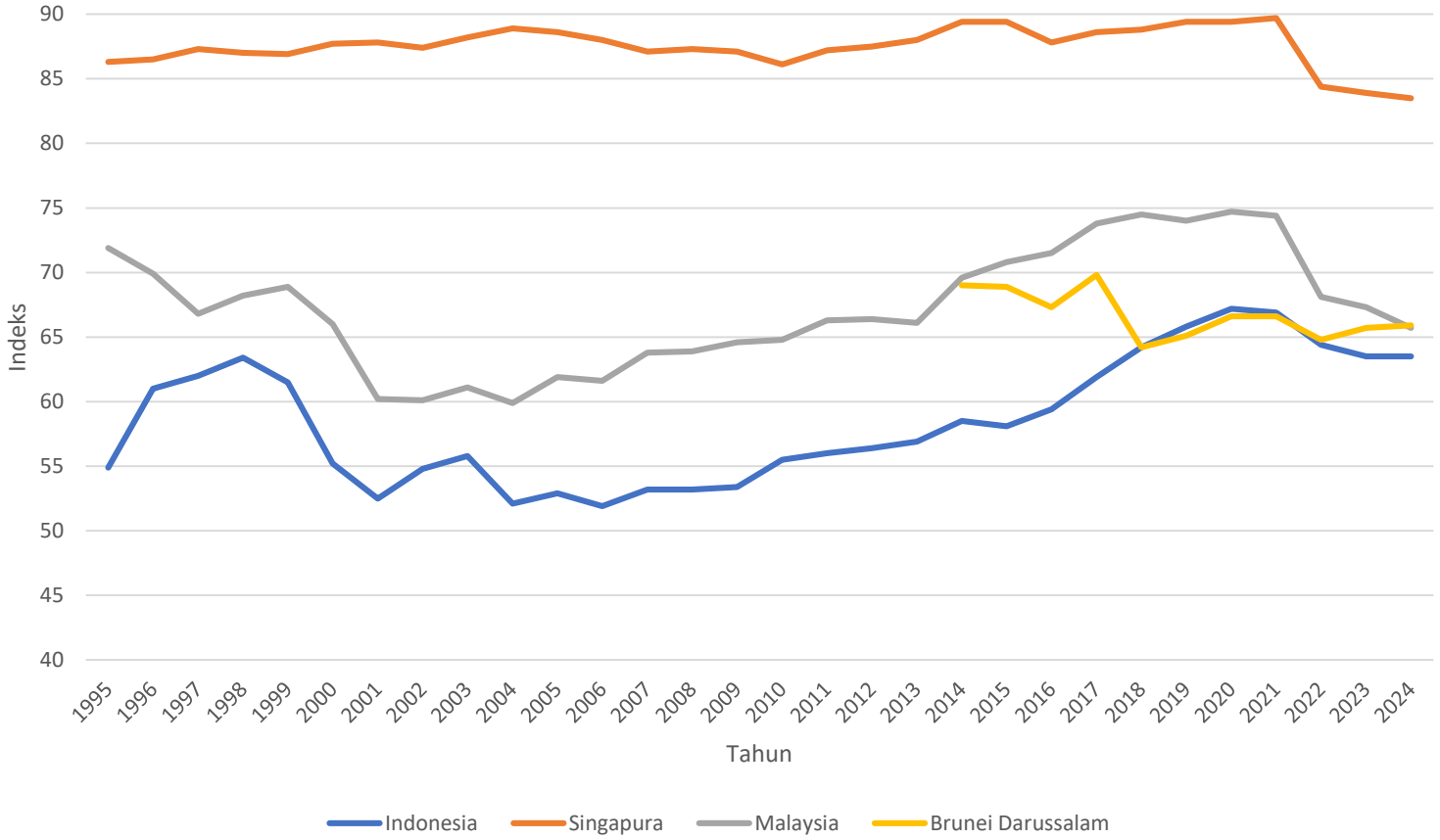
Grafik 1. *Index of Economic Freedom* Indonesia Periode 1995-2024



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2024). Diolah penulis.

- Indeks kebebasan ekonomi di tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat 10 dari 39 negara di kawasan Asia-Pasifik dan peringkat ke 53 dari 184 negara di dunia
  - *Moderately free.*
  - "telah melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi kelemahan struktural perekonomian dan meningkatkan daya saing",
  - reformasi yang menekankan pada "efisiensi peraturan, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan sektor swasta yang dinamis",
  - **korupsi masih menjadi hambatan serius dalam kelembagaan di Indonesia.**

Grafik 2. *Index of Economic Freedom* Indonesia vs. Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam Periode 1995-2024



Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2024). Diolah penulis.

- Terlihat bahwa indeks kebebasan ekonomi di Singapura ternyata adalah yang paling tinggi dibandingkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indeks kebebasan Indonesia sendiri masih tertinggal dari Malaysia, dan kembali disalip oleh Brunei Darussalam pada tahun 2022-2024.
- Singapura adalah negara dengan indeks kebebasan ekonomi terbaik dengan nilai 83,5 atau berada di peringkat satu dari 184 negara di dunia, di mana Singapura mendapatkan kategori bebas di tahun 2024.
  - Hal ini dikarenakan Singapura ditopang nilai yang sangat baik dalam seluruh pilar dan sub-komponen kebebasan ekonominya di tahun 2024.

Indonesia (*moderately free,* skor: 63,5 (peringkat 53 dari 184 negara)

RULE OF LAW

COMPONENT	SCORE
Property Rights	39.2
Judicial Effectiveness	44.5
Government Integrity	38.6

The overall rule of law is weak in Indonesia. The country's property rights score is below the world average; its judicial effectiveness score is below the world average; and its government integrity score is below the world average.

GOVERNMENT SIZE

COMPONENT	SCORE
Tax Burden	81.7
Government Spending	90.2
Fiscal Health	66.8

The top individual income tax rate is 35 percent, and the top corporate tax rate is 22 percent. The tax burden equals 10.9 percent of GDP. Three-year government spending and budget balance averages are, respectively, 18.1 percent and -4.3 percent of GDP. Public debt amounts to 40.1 percent of GDP.

REGULATORY EFFICIENCY

COMPONENT	SCORE
Business Freedom	73.1
Labor Freedom	59.5
Monetary Freedom	78.4

Indonesia's overall regulatory environment is well institutionalized and relatively efficient. The country's business freedom score is above the world average; its labor freedom score is above the world average; and its monetary freedom score is well above the world average.

OPEN MARKETS

COMPONENT	SCORE
Trade Freedom	79.6
Investment Freedom	50
Financial Freedom	60

The trade-weighted average tariff rate is 5.2 percent, and more than 100 nontariff measures are in force. The government has moved to dismantle some of its previously imposed barriers to foreign investment. Overall, the financial system's efficiency has increased. The state still owns several banks.

Singapura (*free,* skor: 83,5 (peringkat 1 dari 184 negara)

RULE OF LAW

COMPONENT	SCORE
Property Rights	94.2
Judicial Effectiveness	58.3
Government Integrity	88.3

The overall rule of law is well respected in Singapore. The country's property rights score is above the world average; its judicial effectiveness score is above the world average; and its government integrity score is above the world average.

GOVERNMENT SIZE

COMPONENT	SCORE
Tax Burden	90.7
Government Spending	89.2
Fiscal Health	76

The top individual income tax rate is 22 percent, and the top corporate tax rate is 17 percent. The tax burden equals 12.6 percent of GDP. Three-year government spending and budget balance averages are, respectively, 19.0 percent and -1.6 percent of GDP. Public debt amounts to 167.5 percent of GDP.

REGULATORY EFFICIENCY

COMPONENT	SCORE
Business Freedom	86.9
Labor Freedom	77.3
Monetary Freedom	76.3

Singapore's overall regulatory environment is well institutionalized and highly efficient. The country's business freedom score is far above the world average; its labor freedom score is above the world average; and its monetary freedom score is well above the world average.

OPEN MARKETS

COMPONENT	SCORE
Trade Freedom	95
Investment Freedom	90
Financial Freedom	80

The trade regime is open and competitive, and no tariffs are imposed on imports. Foreign and domestic businesses are treated equally under the law, and nearly all sectors of the economy are open to 100 percent foreign ownership. The financial sector is highly competitive and resilient.

Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2024).

Indonesia (*moderately free,* skor: 63,5 (peringkat 53 dari 184 negara)

RULE OF LAW

COMPONENT	SCORE
Property Rights	39.2
Judicial Effectiveness	44.5
Government Integrity	38.6

The overall rule of law is weak in Indonesia. The country's property rights score is below the world average; its judicial effectiveness score is below the world average; and its government integrity score is below the world average.

GOVERNMENT SIZE

COMPONENT	SCORE
Tax Burden	81.7
Government Spending	90.2
Fiscal Health	66.8

The top individual income tax rate is 35 percent, and the top corporate tax rate is 22 percent. The tax burden equals 10.9 percent of GDP. Three-year government spending and budget balance averages are, respectively, 18.1 percent and -4.3 percent of GDP. Public debt amounts to 40.1 percent of GDP.

REGULATORY EFFICIENCY

COMPONENT	SCORE
Business Freedom	73.1
Labor Freedom	59.5
Monetary Freedom	78.4

Indonesia's overall regulatory environment is well institutionalized and relatively efficient. The country's business freedom score is above the world average; its labor freedom score is above the world average; and its monetary freedom score is well above the world average.

OPEN MARKETS

COMPONENT	SCORE
Trade Freedom	79.6
Investment Freedom	50
Financial Freedom	60

The trade-weighted average tariff rate is 5.2 percent, and more than 100 nontariff measures are in force. The government has moved to dismantle some of its previously imposed barriers to foreign investment. Overall, the financial system's efficiency has increased. The state still owns several banks.

Malaysia (*moderately free,* skor: 65,7 (peringkat 45 dari 184 negara)

RULE OF LAW

COMPONENT	SCORE
Property Rights	65.7
Judicial Effectiveness	65.6
Government Integrity	48.2

The overall rule of law is relatively well respected in Malaysia. The country's property rights score is above the world average; its judicial effectiveness score is above the world average; and its government integrity score is above the world average.

GOVERNMENT SIZE

COMPONENT	SCORE
Tax Burden	83.9
Government Spending	81.4
Fiscal Health	42.8

The top individual income tax rate is 30 percent, and the top corporate tax rate is 24 percent. The tax burden equals 11.8 percent of GDP. Three-year government spending and budget balance averages are, respectively, 24.9 percent and -5.5 percent of GDP. Public debt amounts to 65.6 percent of GDP.

REGULATORY EFFICIENCY

COMPONENT	SCORE
Business Freedom	70.5
Labor Freedom	58.2
Monetary Freedom	79.1

Malaysia's overall regulatory environment is relatively well institutionalized but lacks efficiency. The country's business freedom score is above the world average; its labor freedom score is above the world average; and its monetary freedom score is well above the world average.

OPEN MARKETS

COMPONENT	SCORE
Trade Freedom	83
Investment Freedom	60
Financial Freedom	50

The trade-weighted average tariff rate is 3.5 percent. The government has taken steps to liberalize foreign investment policies, but for some sectors, restrictions are still in place. Regulatory adjustments in the financial sector include the easing of limits on foreign ownership.

Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2024).

Indonesia (*moderately free,* skor: 63,5 (peringkat 53 dari 184 negara)

RULE OF LAW

COMPONENT	SCORE
Property Rights	39.2
Judicial Effectiveness	44.5
Government Integrity	38.6

The overall rule of law is weak in Indonesia. The country's property rights score is below the world average; its judicial effectiveness score is below the world average; and its government integrity score is below the world average.

GOVERNMENT SIZE

COMPONENT	SCORE
Tax Burden	81.7
Government Spending	90.2
Fiscal Health	66.8

The top individual income tax rate is 35 percent, and the top corporate tax rate is 22 percent. The tax burden equals 10.9 percent of GDP. Three-year government spending and budget balance averages are, respectively, 18.1 percent and -4.3 percent of GDP. Public debt amounts to 40.1 percent of GDP.

REGULATORY EFFICIENCY

COMPONENT	SCORE
Business Freedom	73.1
Labor Freedom	59.5
Monetary Freedom	78.4

Indonesia's overall regulatory environment is well institutionalized and relatively efficient. The country's business freedom score is above the world average; its labor freedom score is above the world average; and its monetary freedom score is well above the world average.

OPEN MARKETS

COMPONENT	SCORE
Trade Freedom	79.6
Investment Freedom	50
Financial Freedom	60

The trade-weighted average tariff rate is 5.2 percent, and more than 100 nontariff measures are in force. The government has moved to dismantle some of its previously imposed barriers to foreign investment. Overall, the financial system's efficiency has increased. The state still owns several banks.

Brunei Darussalam (*moderately free,* skor: 65,9 (peringkat 43 dari 184 negara)

RULE OF LAW

COMPONENT	SCORE
Property Rights	68.8
Judicial Effectiveness	52.3
Government Integrity	59.8

The overall rule of law is relatively well respected in Brunei Darussalam. The country's property rights score is above the world average; its judicial effectiveness score is above the world average; and its government integrity score is above the world average.

GOVERNMENT SIZE

COMPONENT	SCORE
Tax Burden	95.8
Government Spending	73.7
Fiscal Health	20

The top individual income tax rate is 0 percent, and the top corporate tax rate is 18.5 percent. The tax burden equals 8.8 percent of GDP. Three-year government spending and budget balance averages are, respectively, 29.6 percent and -7.1 percent of GDP. Public debt amounts to 2.1 percent of GDP.

REGULATORY EFFICIENCY

COMPONENT	SCORE
Business Freedom	76.5
Labor Freedom	75.2
Monetary Freedom	68.9

Brunei's overall regulatory environment is well institutionalized and relatively efficient. The country's business freedom score is far above the world average; its labor freedom score is above the world average; and its monetary freedom score is above the world average.

OPEN MARKETS

COMPONENT	SCORE
Trade Freedom	84.8
Investment Freedom	65
Financial Freedom	50

The trade-weighted average tariff rate is 0.1 percent, but nontariff measures are in force, and other impediments to trade flows persist. State-owned enterprises distort the economy, and foreign ownership of land is restricted. The small financial sector remains dominated by banks.

Sumber: Index of Economic Freedom dari Kim dan Roberts (2024).

Supremasi hukum: terdapat penurunan sub-komponen hak milik dan sub-komponen efektivitas peradilan sejak tahun 2020. Adanya penurunan dari sub-komponen hak milik dapat terlihat dari masih terdapat beragam konflik agraria yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga menimbulkan tindak kekerasan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat dan warga lokal.

- **Beberapa contoh fenomena terkait hal ini adalah seperti yang terjadi di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (bbc.com, 13 Juni 2024) dan kasus Pulau Rempang yang menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha (ugm.ac.id , 23 September 2023).**

- **Ukuran pemerintah** yang terbagi atas beban pajak, belanja pemerintah, dan kesehatan fiskal ternyata cukup baik. Walaupun demikian, kesehatan fiskal Indonesia masih perlu diperbaiki dan diperkuat mengingat beban utang pemerintah yang meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun.
- **Efisiensi regulasi** dengan sub-komponen kebebasan berbisnis (73,1), kebebasan tenaga kerja (59,5), dan kebebasan moneter (78,4) di Indonesia juga menunjukkan nilai yang baik di atas rata-rata dunia. Kebebasan berbisnis memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan selama 2019-2024, di mana nilai sub-komponen kebebasan berbisnis di 2019 hanya sebesar 69,3.
- **Keterbukaan pasar** yang terdiri dari sub-komponen kebebasan perdagangan, kebebasan investasi dan kebebasan finansial mencatatkan skor masing-masing sebesar 79,6, 50, dan 60 di Indonesia pada tahun 2024 yang mana sub-komponen kebebasan perdagangan lebih tinggi dari rata-rata dunia (69,9), begitu juga dengan kebebasan finansial dengan rata-rata dunia sebesar 48,8.
    - Walaupun pemerintah telah berupaya menghilangkan beberapa hambatan yang sebelumnya diberlakukan terhadap investasi asing, **kebebasan investasi masih perlu diperkuat dan diperbaiki dari sisi kualitas hukumnya, seperti reformasi regulasi dan birokrasi.** Hal ini diutarakan oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) dalam ekonomi.bisnis.com (16 Oktober 2024) di mana ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan bagi investasi di kawasan industri yang bermuara pada stagnannya pertumbuhan ekonomi.

Apakah Integritas Pemerintah Berpengaruh terhadap Lingkungan di Indonesia?

Tabel 3. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
LogGDPcap	0,4318	6,4095	0,0000***
LogEnConscap	0,2751	3,7573	0,0010***
LCSE	-0,0088	-2,4028	0,0247**
LogGI	0,1129	2,8947	0,0082***

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

- $LogGDPcap$ berarti variabel Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berpengaruh signifikan, di mana **setiap peningkatan 1% PDB per kapita akan meningkatkan nilai jejak ekologis (*ecological footprint*) sebesar 0,4318% *holding constant* variabel lainnya.** Hal ini mungkin ketika adanya peningkatan PDB per kapita meningkat, maka individu maupun rumah tangga akan mungkin berbelanja lebih banyak untuk energi, air yang dapat meningkatkan jejak ekologis. Belum lagi kenaikan PDB per kapita yang juga merupakan indikasi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bangunan, dan fasilitas umum yang membutuhkan sumber daya besar yang bermuara pada peningkatan jejak ekologis, seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan konsumsi material lainnya.
- $LogEnConscap$ atau konsumsi energi per kapita juga akan meningkatkan jejak ekologis di mana **1% kenaikan konsumsi energi per kapita akan meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,2751% *holding costant* variabel lainnya.** Hal ini dikarenakan konsumsi energi per kapita, terutama dari sumber energi dari bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas dapat menghasilkan emisi CO_2 yang bermuara pada peningkatan jejak ekologis. Termasuk juga di dalamnya adalah eksploitasi sumber daya energi guna memenuhi kebutuhan energi. Misalnya, melakukan penambangan dan pengeboran, yang juga membutuhkan energi yang menghasilkan polutan dan emisi gas rumah kaca lainnya.

Tabel 3. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
LogGDPcap	0,4318	6,4095	0,0000***
LogEnConscap	0,2751	3,7573	0,0010***
LCSE	-0,0088	-2,4028	0,0247**
LogGI	0,1129	2,8947	0,0082***

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

- LCSE atau *low carbon energy from renewable source* ternyata menurunkan *ecological footprint* di mana **setiap perubahan satu unit LCSE (yang dalam persen) dikaitkan dengan perubahan sebesar -0,88% pada jejak ekologis *holding costant* variabel lainnya.** Hal ini dikarenakan penggunaan energi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti energi angin, energi surya, lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca selama proses pembangkitan energinya. Selain itu, energi dengan teknologi rendah karbon juga didesain untuk meningkatkan efisiensi energi, sehingga mengurangi jejak ekologis dan membuat lingkungan lebih berkelanjutan dan akan memberdayakan lingkungan.
- **Integritas pemerintah ternyata meningkatkan jejak ekologis di mana 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129% *holding costant* variabel lainnya.** Dapat dilihat bahwa hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangat kompleks, di mana kurangnya integritas pemerintah mengurangi kepercayaan masyarakat dan vitalitas ekonomi dengan meningkatkan biaya kegiatan ekonomi (Kim & Roberts, 2024).
    - **Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan integritas pemerintah di Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan efisien, mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang mengarah pada tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi.**
    - **Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi tersebut melibatkan peningkatan produksi industri, konsumsi energi, dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan jejak ekologis.**

Tabel 4. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
ΔLogGDPcap	0,5593	5,1991	0,0000***
Δ LogGI	-0,0159	-0,6515	0,5212
ECT(-1)	-0,9628	-8,0573	0,0000***
c	13,0151	8,0649	0,0000***
Adj. R^2	0,9863		
F-statistik	269,3458***		

*Sumber: Diolah penulis dengan Eviews 13. *, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1 %. Estimasi menggunakan Newey-West standard errors.*

- Didapatkan bahwa dalam jangka pendek, hanya PDB per kapita saja yang berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis seperti pada jangka panjang.
- Sementara, **integritas pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jejak ekologis Indonesia dalam jangka pendek. Hal ini dapat disebabkan pengaruh kebijakan yang didorong oleh integritas pemerintah terhadap jejak ekologis yang memerlukan waktu lebih lama untuk terlihat perubahannya.** Kebijakan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan korupsi sering kali berdampak pada faktor yang berhubungan dengan lingkungan secara perlahan dan membutuhkan waktu lama, seperti perubahan dalam penegakan regulasi lingkungan, investasi hijau, maupun kebijakan mitigasi perubahan iklim.

- Indeks kebebasan ekonomi di Indonesia terlihat menurun sejak tahun 2020. korupsi masih menjadi hambatan serius dalam kelembagaan di Indonesia. Selain itu, kondisi kebebasan ekonomi Indonesia dalam konteks Asia Tenggara masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam.
- **Indonesia masih perlu memperbaiki beberapa pilar kebebasan ekonomi terutama di supremasi hukum bersama dengan sub-komponennya (hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan), karena pada dasarnya, supremasi hukum sangat berkelindan dengan kelembagaan inklusif yang berkaitan dengan tata kelola kenegaraan dan juga pembangunan ekonomi.**
- Terkait dengan analisis ekonometrika dalam jangka panjang:
  - Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis,
  - Konsumsi energi per kapita juga positif signifikan meningkatkan jejak ekologis,
  - *Low carbon energy from renewable source* memiliki nilai negatif signifikan bagi jejak ekologis, dan
  - **Integritas pemerintah ternyata positif signifikan meningkatkan jejak ekologis. Hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangatlah kompleks.**
- Dalam jangka pendek, hanya PDB per kapita saja yang berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis. Sementara, variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan.

- *Pertama*, **pemerintahan Presiden Prabowo harus memperbaiki supremasi hukum termasuk dalam kebijakan hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah, termasuk perbaikan tata kelola di dalam pemerintahannya melalui perbaikan kualitas lembaga ke arah lembaga inklusif yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.**
  - Pemerintahan Presiden Prabowo harus sadar bahwa semua individu, termasuk entitas publik maupun swasta, dan negara adalah setara dan tunduk pada hukum.
  - Adanya supremasi hukum yang tidak diskriminatif dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang bersifat inklusif, yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh individu, serta tidak menghambat individu untuk mengakses sumber daya maupun berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik.
  - Lembaga yang inklusif juga dapat memperkuat demokrasi, stabilitas sosial, maupun stabilitas ekonomi.
- *Kedua*, **pemerintahan Presiden Prabowo perlu menyeimbangkan integritas pemerintah dengan fokus ke arah pembangunan ekonomi yang berasaskan keberlanjutan, baik melalui pengembangan ekonomi hijau maupun ekonomi biru seperti yang tertuang dalam Asta Cita.**
  - Misalnya, dalam mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru, pemerintah dapat mendorong integritas pemerintah untuk menarik pihak swasta dalam berinvestasi di infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan dengan memberikan insentif.
  - Selain itu, pemerintah perlu segera memberlakukan pajak karbon untuk perusahaan yang menghasilkan emisi CO_2 tinggi yang dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan dan pendataan, serta penggunaan pajak karbon tersebut.
  - Pemerintahan Presiden Prabowo juga perlu memberikan insentif fiskal atau subsidi bagi investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau geotermal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendorong proses kebijakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengubah *framework* kebijakan menjadi berkelanjutan beiringan dengan mendorong integritas pemerintah.

TERIMA KASIH

Instagram: @indonesian.institute
Facebook: The Indonesian Institute
X: @the_indonesian
YouTube: The Indonesian Institute
Website: www.theindonesianinstitute.com
Instagram Ngobi (Ngobrol Kebijakan) by The Indonesian Institute: @ngobi.podcast
Spotify: Ngobi (Ngobrol Kebijakan)

Akses Penelitian Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia

https://bit.ly/TIIekonomi